Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	7

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DEWAN PERSILAKAN ANIES TARIK RAPERDA REKLAMASI

Anies-Sandiaga menunggu DPRD menggelar rapat paripurna istimewa.

Linda Hairani
linda.hairani@tempo.co.id

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mempersilakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan jika ingin menghentikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang reklamasi saat ini. "Silakan, itu hak dia," kata Prasetio, kemarin.

Prasetio merujuk kepada pernyataan dari Ketua Tim Sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Sudirman Said, pada Sabtu lalu. Sudirman mengungkap kemungkinan dua raperda itu, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, ditarik untuk direvisi.

Menurut Sudirman, pembahasan yang sempat dilakukan kembali di masa transisi pemerintahan yang lalu nyaris dipaksakan. Revisi akan dilakukan untuk membuat kedua raperda selaras dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Prasetio mengatakan Dewan, kata dia, membahas rancangan dua peraturan daerah itu lantaran pemerintah DKI Jakarta mengirim drafnya tahun lalu agar dibahas bersama. Adapun rencana Anies dan wakilnya, Sandiaga Uno, untuk menghentikan reklamasi dipastikannya bukan berkaitan dengan instansinya, melainkan pemerintah pusat.

Dari dua peraturan daerah itu, Prasetio mengatakan hanya rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta yang masih perlu dibahas. Tahun lalu, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Dewan berbeda pendapat ihwal pasal yang mengatur kontribusi tambahan yang harus dibayarkan oleh pengembang reklamasi. Tahun lalu, Basuki berkukuh meminta kontribusi tambahan itu yang nilainya 15 persen dari nilai lahan yang bisa dijual pengembang di pulaunya masing-masing.

Adapun Rancangan Peraturan Daerah (perda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sudah selesai dibahas. Namun Prasetio mengatakan Perda Rencana Zonasi belum disahkan dalam rapat paripurna. Dewan sempat membahas rancangan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir pada 11 Oktober lalu, tiga hari menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Namun keesokan harinya, pembahasannya kembali menemui jalan buntu.

Prasetio mengatakan sudah meneken surat untuk Anies. Ia memperkirakan suratnya akan dikirim hari ini. Surat itu berisi pemberitahuan agar Anies mengirim surat ke Dewan jika ingin pembahasan rancangan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dilanjutkan.

Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mengatakan Anies juga harus mengirim surat ke DPRD untuk menarik rancangan perda tersebut. Dia juga mengatakan, "Bisa saja ditarik kalau untuk direvisi," kata dia.

Gubernur Jakarta Anies Baswedan belum juga mengeluarkan pernyataan eksplisit soal kelanjutan pembahasan reklamasi. Ia berjanji akan membahas keputusan itu setelah rapat paripurna istimewa penyampaian visi dan misi di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta digelar.

Anies sedang menunggu jadwal penetapan rapat paripurna istimewa itu. Sebab, menurut dia, rapat paripurna tersebut menandakan titik awal langkah kerjanya dengan Sandiaga.

Rapat paripurna istimewa yang dimaksud Anies mengacu pada surat edaran dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE.162/3484/OTDA. Dalam edaran itu, rapat paripurna istimewa itu bersifat wajib untuk semua pasangan kepala daerah yang baru dilantik.

Sandiaga juga mengatakan rapat paripurna istimewa menjadi prioritas lantaran Anies-Sandiaga akan bermitra dengan Dewan selama lima tahun mendatang. Ia berharap

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	7

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Dewan Persilakan Anies Tarik Raperda Reklamasi

rapat tersebut diselenggarakan memasuki pekan keduanya bertugas. "Kami menunggu rapat paripurna, kami ingin memulainya dengan silaturahmi," kata dia.

Saat membahas reklamasi, Sandiaga mengatakan harus ada kajian tentang jumlah dan model lapangan kerja yang dihasilkan di pulau reklamasi. Kajian itu bertujuan memastikan reklamasi bisa bermanfaat bagi rakyat Indonesia, dari pendidikan sampai infrastruktur. ● DEVY ERNIS

Silang Pendapat Rapat Paripurna Istimewa

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan tak akan menggelar rapat paripurna istimewa. Alasannya, menurut dia, rapat itu tak bersifat wajib. "Urgensinya apa?" kata dia, kemarin.

Prasetio menjelaskan, Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan menyatakan rapat paripurna istimewa hanya digelar saat ada penyampaian hasil audit laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, hari jadi DKI Jakarta, dan pergantian antar-waktu anggota DPRD.

Rapat juga dianggapnya tak perlu digelar untuk Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Sebab, keduanya sudah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan keduanya bisa langsung bekerja tanpa menunggu rapat paripurna.

Ia mempersilakan Anies-Sandiaga menemuinya kapan pun jika keduanya bertujuan untuk bersilaturahmi. "Natural saja, silakan bekerja. Nanti juga bertemu dengan saya," kata dia.

Pendapat Prasetio tentang rapat paripurna istimewa bertolak belakang dengan surat edaran dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE.162/3484/OTDA. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan rapat paripurna istimewa itu bersifat wajib untuk semua pasangan kepala daerah yang baru dilantik. Hal itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pedoman tentang Tata Tertib DPRD.

Sumarsono menjelaskan, surat edaran itu bertujuan untuk menjembatani hubungan gubernur dan wakil gubernur dengan DPRD. Sebab, pelantikan keduanya Senin pekan lalu dialihkan ke Istana Negara. Menurut dia, rapat paripurna istimewa sekaligus memperkuat posisi Dewan dengan meminta gubernur menyampaikan pidato politiknya.

Sumarsono mengatakan Dewan memiliki waktu 14 hari sejak Anies-Sandiaga dilantik untuk menetapkan jadwal rapat paripurna. Dari semua provinsi yang kepala daerahnya dilantik dari hasil pemilihan 2017, hanya DKI Jakarta yang belum menggelar rapat paripurna. "Masih ada waktu," kata Sumarsono. ● DEVY ERNIS | LINDA HAIRANI